

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Buthy, Muhammad Sa'id Ramadhan. *Sirah Nabawiyah :Analisis Ilmiah Manhajiah Sejarah pergerakan Islam di Masa Rasulullah saw*. Terj Aunur Rafiq Shaleh Tamhid. Jakarta: Robbani Press, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Press, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Buana Ilmu, 2007.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (edisi revisi) Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Fatimah & Nur Alimah. *Fiqih Siyasah*. Makasar: Pustaka Almaida, 2015.
- Fatwa, A.M. *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Harisudin, Noor. *Pengantar Ilmu Fiqih*. Surabaya: Pena Salsabila. 2013.
- Ibnu Syarif, Mujar & Khamami Zada. *Fiqih Siyasah (Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qowaid Al-Fiqiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV.Amanah, 2019.
- Iqbal, Muhammad. *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahan (edisi penyempurnaan)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019.
- Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham. *Parti Politik dan Sistem Pemilihan Umumdi Indonesia (Teori, Konsep dan Isu Strategis)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Lexy J.Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

- Muhaimin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Mataram:Mataram University Press, 2019.
- Muhtadi, Burhanuddin. *Agar Polarisasi Tidak Menjadi Normalitas dalam Politik Kita (dalam Bergerak Bergerak Berdampak)*. Jakarta:Narasi, 2020
- Mulyawan, Rahman. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Sumedang: UNPAD PRESS, 2015.
- Pamungkas, Sigit. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta:Lab Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM, 2009.
- Prasetyo,Teguh. *Filsafat Pemilu*. Bandung: Nusamedia, 2018.
- Rais, M.Dhiauddin. *Teori Politik islam. terj Abdul hayyie al-Kattani dkk*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.
- Sunarso. *Perbandingan Sistem Pemerintahan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.
- Widayati. *Problematika Presidential Threshol (Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak yang Berkeadilan)*. Semarang: UNISSULA Press, 2019.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2004.

Prosiding

- Nugroho, Rahmat Muhajir et al, “Comparison of Threshold Provisions for Presidential Candidacy in Indonesia and Turkey,” *Proceeding of the International Conference on Sustainable Innovation on Humanities, Education, and Social Science held in Universitas Muhammadiyah Yogyakarta’s, Yogyakarta 20-21 July 2022*, ed.Dyah Mutiarin et al, 24-3. Dorsrecht : Atlantis Press, 2022

Skripsi, Tesis & Jurnal

- Abadi, Songga Aurora. “Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) Terhadap Stabilitas Sistem Presidensial Dan Sistem Multipartai Sederhana Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 2:1 (Juni 2022):11-15.
- Abdurohman. “*Presidential Threshold* dalam Pemilu Indonesia, Perspektif Al-Mawardy.” *Tesis*, Jurusan Hukum Tata Negara UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

- Anggara, Vani. "Dinamika Presidensial Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia." *Jurnal Transformatif* 5:2 (September 2019):17-36.
- Arake, Lukman, "Sistem Pengangkatan Presiden Dalam Fiqih Siyasah," *Ahkam* 15:1 (Januari 2015): 49-58.
- Bahar, Saafrudin. "PRRI-Persemesta: Sebuah Kasus Keterkaitan antara Integrasi Nasional dan Perang Dingin." *Jurnal Studi Amerika* 4 (1999):28-49.
- Baskoro, Aji. "Presidential Threshold di Indonesia dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*." *Legislatif* 2:2 (Juni 2019):36-56.
- Bukido, Rosdalina. "Kajian Terhadap Sistem pemerintah dan Praktiknya Menurut UUD 1945." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 10:1 (Desember 2012):1-25.
- Ghofar, Abdul. "Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara lain." *Jurnal Konstitusi* 15:2 (September 2018):480-501.
- Huda, Muhamad Nurul. "Kedudukan dan Peran *Ahl Al-Hall wa Al-'Aqd* serta Relevansinya pada Kinerja DPR." *Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2:1 (Juni 2022) :145-164
- Hutagaol, Novita Mandasari. "Analisis dan perbandingan Atar UUD 1945, Konstitusi RIS, UUD 1950 dan UUD 1945 Amandemen, Subtansi Komparasi dan Perubahan Yang Penting." *Jurnal Dimensi* 5:1 (2016): 1-14
- Julkifli. "Relasi Agama dan Negara." *JURIS* 13:2 (Desember 2014):175-183
- Kadenun, H. "Kedudukan *Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi* Dalam Pemerintahan Islam." *Qalamuna* 11:2.(Juli-Desember 2019) : 89-110
- Kristiannando, Youngki Sendi. "Syarat Kepala Negara Menurut Al-Mawardi dan Al-Ghozali." *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- M.Hum, Zulham. "Sistem Pemerintahan Islam: (Menurut al-Ghazali dan al A'la al-Maududi)." *AL-MUQARANA* 2:2 (Januari-Desember 2014):1-17.
- Mansyur, Ibnu Chaerul. "Polarisasi Politik di Indonesia 2014-2019: Sebuah Kajian Pustaka". *Jurnal Politik Profetik* 11:1 (Juni 2023):1-22.
- Mausili, Dwi Riani. "Anomali Presidensial Threshold dalam Sistem Pemerintah Indonesia:Reduksi Parlemerter dalam Sistem Presidensial Indonesia." *Bappenas Working Paper* 2:1 (Maret 2019):31-42.

- Mukhtarrija, Muhammad, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani dan Agus Riwanto. "Inefektivitas Pengaturan Presidensial Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24:4 (Oktober 2017):644-662.
- Muksana Pasaribu. "Masalah dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Justitia* 1:4 (Desember 2014):350-360
- Nugraha, Hendri Hermawan & Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4:1 (Maret 2018):63-75.
- Partono. "Sistem Multipartai, Presidensial dan Persoalan Efektivitas Pemerintahan." *Jurnal Legislasi* 5:1 (Maret 2008):13-28.
- Putri, Indah Aulia. "Presidensial Threshold dan Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia." *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019.
- Rantau, Muhammad Ibrahim. "Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia: Analisis Terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Jurnal Pelita-Penelitian dan Karya Ilmiah* 19:2 (Desember 2019):181-193.
- Rofi'ah, Siti Zahrotul. "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Penentuan Presidensial Threshold Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Romli, Lili. "Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia." *Jurnal Politica* 2:2 (November 2011):199-219.
- Rosyadi, Imron. "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum" *SUHUF* 24:1 (Mei 2012):14-25.
- Scot, Mainwaring. "Presidentialism, Multipartism and Democracy; The Difficult Combination." *Comparative Political Studies, Sage Publication Inc* 26:2 (Juli 1993):198-225.
- Syarif, Mujar Ibnu. "Spirit Piagam Jakarta Dalam Undang-Undang Dasar." *Jurnal Cita Hukum* 4:1 (Juni 2016):154-170.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakilnya

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Draft Naskah Akademik Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Putusan MK Nomor 20/PUU-XX/2022

Website

fahum.umsu.ac. "Bentuk Pemerintahan Republik: Pengertian ,Ciri dan Bentuknya" 12 September 2023 <https://fahum.umsu.ac.id/bentuk-pemerintahan-republik-pengertian-ciri-dan-bentuknya/> Diakses pada 15 Agustus 2023

Gambar 1 <https://www.donisetawan.com/partai-pemenang-pemilu-2004/>) diakses pada 12 Juli 2023

Hukumonline.com, "Mengenal Wewenang dan Fungsi MA" 18 Oktober 2021 <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-wewenang-dan-fungsi-ma-lt616d670382aab/?page=2> Diakses 17 September 2023

Indonesiabaik.id."Sejarah Pemilu di Indonesia: Pemilu 1955." 10 Juni 2019 (https://indonesiabaik.id/motion_grafis/sejarah-pemilu-di-indonesia-pemilu-1955/) Diakses 12 Juni 2022

Jabar.kemenag.go.id. "*Masalah Mursalah* Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam." Juni 2021 (<https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/masalah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam>) 21 Juni 2023

Kemendikbud. "Ambang batas" 2016 (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/AMBANG%20BATAS>)

Kompas.com "PDI-P Dapat Usung Capres Sendiri Tanpa Perlu Koalisi, Bagaimana Bisa?." 20 Mei 2022 <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/20/20543521/pdi-p-dapat-usung-capres-sendiri-tanpa-perlu-koalisi-bagaimana-bisa?page=all> Diakses 19 Agustus 2023

Kompas.com "Ini Hasil Resmi Rekapitulasi Suara Pilpres 2014" 22 Juli 2014 <https://nasional.kompas.com/read/2014/07/22/20574751/Ini.Hasil.Resmi.Rekapitulasi.Suara.Pilpres.2014?page=all> Diakses pada 18 Oktober 2023

- Kompas.com, “Silang Pendapat Parpol soal ”Presidential Threshold” Kembali Mengemuka.”¹⁵ Desember 2021
<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/12/15/silang-pendapat-parpol-soal-presidential-threshold-kembali-mengemuka> Diakses 28 September 2023
- Kompas.com. “Mengapa Sering terjadi Pergantian Kabinet pada Masa Demokrasi Liberal.” 31 Desember 2021
<https://www.kompas.com/stori/read/2021/12/31/090000179/mengapa-sering-terjadi-pergantian-kabinet-pada-masa-demokrasi-liberal-?page=all>
 Diakses 19 Juni 2023
- Kompas.com.”Sejarah Pemilu di Indonesia dari Tahun 1955-2019.” 25 Januari 2022 (<https://regional.kompas.com/read/2022/01/25/203614378/sejarah-pemilu-di-indonesia-dari-tahun-1955-hingga-2019/>) Diakses pada 11 Juni 2022
- Kompaspedia.kompas.id. “Judicial Review Mahkamah Konstitusi atas ketentuan Presidential Threshold.” 19 Juli 2022
<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/judicial-review-mahkamah-konstitusi-atas-ketentuan-presidential-threshold/>) Diakses 14 Juni 2023
- Mediaindonesia.com. “Ambang Batas Presiden Picu Polarisasi.” 16 Juni 2016 (<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/499891/ambang-batas-presiden-picu-polarisasi>) Diakses pada 31 Agustus 2023
- Republika.co.id. “MK Tegaskan Presidential Threshold Bersifat Open Legal Policy.” 26 Juli 2022 (<https://news.republika.co.id/berita/rfmmgh428/mk-tegaskan-presidential-threshold-bersifat-open-legal-policy>) Diakses pada 30 Agustus 2023